

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Agustus 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH  
**SUB UNIT KERJA** : BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUSMANTO  
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
3. NHK : 218061

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/70 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	189.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA DIESEL G Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 168.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERTAHAPAN</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	40.356.236
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	429.856.236
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	271.924.477
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	157.931.759

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **4 November 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.